

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Jawa Pos
Media Online

Wilayah: Kabupaten Klaten

Halaman 6

Anggaran Jalur Evakuasi Membengkak Rp 8 Miliar

KLATEN, Jawa Pos - Jalur evakuasi untuk korban erupsi Gunung Merapi rusak parah. Panjang kerusakan mencapai 6 kilometer (km), tepatnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Klaten. Kabar tentang kondisi tersebut bahkan sudah sampai di telinga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Lewat cuitannya di media sosial *Twitter*, Ganjar meminta Bupati Klaten Sri Mulyani serta dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) mengecek kondisi jalan tersebut. Selanjutnya, DPUPR menyiapkan anggaran pemeliharaan jalan.

"Anggaran pemeliharaan jalan semula Rp 10 miliar, ditingkatkan jadi Rp 18 miliar. Tambahan anggaran Rp 8 miliar tersebut dialokasikan untuk pemeliharaan ruas jalan yang rencananya ditingkatkan, tetapi belum terlaksana. Ditambah beberapa ruas jalan yang merupakan jalur evakuasi," jelas

Kabid Bina Marga DPUPR Klaten Suryanto kemarin (14/6).

Dana pemeliharaan jalur evakuasi terbilang cukup besar. Karena itu, diperlukan perencanaan matang sembari melihat kondisi. Pemeliharaan jalur evakuasi yang diusulkan meliputi sejumlah ruas jalan di lereng Merapi. Terutama di Kecamatan Kemalang.

Terkait dengan peningkatan ruas jalan, awalnya ada 18 proyek. Sedianya proyek itu dilaksanakan tahun ini dengan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU). Tetapi, kini tinggal lima proyek saja. Sebab, anggarannya di-*refocusing* untuk penanganan Covid-19. "Jika usulan disetujui dan ditetapkan, perkiraan mulai dikerjakan Agustus-September," imbuhnya.

Lima program peningkatan ruas jalan, lanjut Suryanto, dikerjakan dengan dana insentif daerah (DID) dan dana bagi

hasil cukai tembakau (DBHCT) Rp 20 miliar. Meliputi ruas Jalan Tegalgondo-Sidoarjo, Prawatan-Margorejo, Pakis-Wonosari, Padangan-Jelobo, dan simpang empat Jetis-Polanharjo.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Rakyat Antikorupsi Klaten (ARAKK) Muslih memandang, Pemkab tidak mampu membuat kebijakan dengan skala prioritas dalam pembangunan. Salah satu indikatornya, kukuh melanjutkan pembangunan gedung serbaguna daripada peningkatan jalur evakuasi. Pagu anggaran tahap kedua proyek gedung serbaguna Rp 42 miliar.

"Untuk gedung pertemuan, kebutuhannya tidak mendesak. Malah banyak proyek yang lebih urgen untuk dibangun justru dibatalkan kontraknya atau gagal dilaksanakan dengan alasan efisiensi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19," terang dia. (**ren/fer/c11/ami**)